



RENJA PERUBAHAN 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bone



 @BPBDKAB.BONE
 BPBD KAB.BONE
 CALL : 0481112

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia – Nya, kami telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang kami susun ini adalah merupakan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2026, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Insha Allah Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini hingga selesai.

Watampone, Agustus 2024


Plt. Kepala Pelaksana BPBD
MUHNZUHLI, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 197810041998101001

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PERBUP RENJA PERUBAHAN 2024.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALKU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	50
4.1 Gambaran umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan	
Penanggulangan Bencana Daerah	50
4.2 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	50
BAB V. PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 sebagai sebuah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Perubahan Renja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran; arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen Renja Perubahan ini merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Pembangunan BPBD Kabupaten Bone merupakan bagian dari pembangunan daerah kabupaten Bone sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang di emban BPBD Kab.

Bone. Sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024, Landasan

hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

- 1). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 3). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulaangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 8.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
- 12). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);
- 13). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 9);
- 14.) Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan logistik, serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan perencanaan serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, Bab ini berisi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun lalu yang digunakan untuk mengukur kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dalam bentuk indikator kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, Analisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja BPBD sampai dengan triwulan II selain itu bab ini juga berisikan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini berumusan rencana program dan kegiatan dan pagu dan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2024 .

Bab IV. Penutup, Bab ini berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024, khususnya arahan dalam menggunakan Renja sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efesiensi dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Anggaran Tahun 2023).

Anggaran sebelum perubahan APBD	Rp. 5.285.874.288
Penambahan/Pengurangan APBD	<u>Rp. 45.437.524</u>
Anggaran setelah perubahan	Rp. 5.240.436.764
Realisasi	<u>Rp. 5.191.305.279</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 49.131.485

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Dengan memperhatikan Rencana Strategik dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran strategik secara kuantitatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/BONE

1. Kegiatan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan:

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam menyusun dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan dana sebesar Rp.68.421.760,- terealisasi sebesar Rp.68.320.800,- atau 99% sisa dana sebesar Rp.100.960,-
- **Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, telah terlaksana sesuai dengan laporan capaian dan realisasi kinerja BPBD, sehingga proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi dana Rp.31.325.960,- dengan realisasi sebesar Rp.31.301.800,- atau 99% dengan sisa dana Rp.24.160,-
- **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi namun terdapat dana sebesar Rp.13.615.280,- dengan realisasi sebesar Rp.13.599.600,- atau 99% sisa dana sebesar Rp.15.680,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.1.883.132.844,- dengan realisasi Rp.1.881.973.381,- atau 99% dengan sisa dana Rp.1.159.563,-

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan pakaian dinas terpenuhi, dengan alokasi dana Rp.97.500.000,- dengan realisasi Rp.97.500.000,- atau 100% dengan sisa dana Rp.0,-

4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.74.877.680,- dengan realisasi Rp.74.764.400,- atau 99% dengan sisa dana Rp.113.280,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan bahan logistik kantor dapat tersedia, Dengan alokasi

dana Rp.31.561.140,- dengan realisasi Rp.31.467.300,- atau 99% dengan sisa dana Rp.93.840,-

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.9.536.500,- dengan realisasi Rp.9.535.450,- atau 99% dengan sisa dana Rp.1.050,-

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dengan alokasi dana Rp.310.362.000,- dengan realisasi Rp.310.287.000,- atau 99% dengan sisa Rp.75.000,-

5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub kegiatan:

- **Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.76.812.000,- dengan realisasi Rp.75.521.540,- atau 98% dengan sisa Rp.1.290.460,-

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga jasa pelayanan umum kantor dapat tersedia, dengan

alokasi dana Rp.171.556.500,- dengan realisasi Rp.169.658.266,-
atau 98% dengan sisa 1.898.234,-

6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dapat tersedia. Dengan alokasi dana Rp.211.810.000,- dengan realisasi Rp.174.929.500,- atau 82% dengan sisa Rp.36.880.500,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga, pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.8.980.000,- dengan realisasi Rp. 8.980.000,- atau 100%

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.68.250.150,- dengan realisasi Rp.64.145.500,- atau 93 % dengan sisa dana 4.104.650,-

II.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)
Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten /kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.30.620.000,- dengan realisasi Rp.30.620.000,- atau 100%.

2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.4.940.000,- dengan realisasi Rp.4,940.000,- atau 100%.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pelatihan mitigasi bencana dapat berjalan lancar, dengan alokasi dana Rp.577.908.200,- dengan realisasi Rp.576.114.792,- atau 99% dengan sisa Rp.1.793.408,-
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penguatan kapasitas untuk kawasan dapat berjalan lancar, dengan alokasi dana Rp.14.734.000,- dengan realisasi Rp.14.492.900,- atau 98% dengan sisa Rp.241.100,-

- **Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan alokasi dana Rp.245.980.000,- dengan realisasi Rp.244.698.000,- atau 99% dengan sisa Rp.1.282.000,-

- **Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan gladi dapat berjalan lancar, dengan alokasi dana Rp.3.000.000,- dengan realisasi Rp.3.000.000,- atau 100%.

3. **Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Sub kegiatan:

- **Respon Cepat Darurat Kabupaten/Kota**

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan respon cepat darurat bencana dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.15.037.500,- dengan realisasi Rp.14.980.000,- atau 99% dengan sisa Rp.57.500,-

- **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota dapat

dilakukan, dengan alokasi dana RP.1.253.944.000,- dengan realisasi Rp.1.253.943.900,- atau 99% dengan sisa Rp.100,-

- Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.36.531.250,- dengan realisasi Rp.36.531.250,- atau 100%

B. Analisis Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD sampai dengan Triwulan II

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II

- I. 1. Kegiatan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam menyusun dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan sisa dana sebesar Rp.33.171.700,- atau terealisasi sebesar Rp.30.720.000,- atau 93% dari jumlah dana sebesar Rp.2.451.700,-
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, telah terlaksana sesuai dengan laporan

capaian dan realisasi kinerja BPBD, sehingga proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi dana Rp.8.778.600,- dengan realisasi sebesar Rp.2.250.000,- atau 26% dengan sisa dana Rp.6.528.600,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi, dengan jumlah dana Rp.13.157.280,- dengan realisasi sebesar Rp.3.257.280,- atau 25% sisa dana Rp.9.900.000,-

7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.1.999.647.728,- dengan realisasi Rp.1.242.801.398,- atau 62% dengan sisa dana Rp.756.846.330,-

8. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.37.853.100,- dengan realisasi Rp.36.469.200,- atau 96% dengan sisa dana Rp.1.383.900,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan bahan logistik kantor dapat tersedia, Dengan alokasi dana Rp.21.061.140,- dengan realisasi Rp.20.740.200,- atau 98% dengan sisa Rp.320.940,-

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.5.801.800,- dengan realisasi Rp.3.287.750,- atau 57% dengan sisa dana Rp.2.514.050,-

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD**

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dengan alokasi dana Rp.115.188.000,- dengan realisasi Rp.53.000.000,- atau 46% dengan sisa Rp.62.188.000,-

9. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub kegiatan:

- **Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik**

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dapat tersedia, dengan alokasi dana 60.394.500,- dengan realisasi Rp.42.898.915,- atau 71% dengan sisa Rp.17.495.585,-

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga jasa pelayanan umum kantor dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.93.154.800,- dengan realisasi Rp.82.363.664,- atau 88% dengan sisa Rp.10.791.136,-

10. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dapat tersedia. Dengan alokasi dana Rp.116.699.600,- dengan realisasi Rp.53.946.140,- atau 46% dengan sisa Rp.62.753.460,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga, pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.4.510.000,- dengan realisasi Rp.550.000,- atau 12% sisa dana sebesar Rp.3.960.000,-

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dapat terlaksana, dengan alokasi

dana Rp.2.865.150,- dengan realisasi Rp.1.990.500,- atau 69% dengan sisa dana Rp.874.650,-

II.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)

Sosialisasi,komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten /kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.10.700.000,- dengan realisasi Rp.10.500.000,- atau 98% dengan sisa dana Rp.200.000,-

2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sub kegiatan:

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Kegiatan ini telah terlaksana., dengan Anggaran sebesar Rp.1.754.400.000 terealisasi sebesar Rp.841.278.400,- atau 48% sisa dana sebesar Rp.913.121.600,-

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan:

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Kegiatan ini belum terlaksana sepenuhnya, dengan alokasi dana Rp.245.600.000,-
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang

cukup sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.12.060.000,- dengan realisasi Rp.2.010.000,- atau 17% dengan sisa Rp.10.050.000,-

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.20.223.000,- dengan realisasi Rp.10.840.000,- atau 54% dengan sisa Rp.9.383.000,-

- Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota belum terlaksana dengan anggaran sebesar Rp.14.381.000,-

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan:

- Penyusun Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Dan Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Kegiatan ini telah terlaksana, dengan alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,- terealisasi sebesar Rp.13.210.000,- atau 16% sisa dana Rp.66.790.000,-

(Tabel I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel TC.29)

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

lembar.....

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1														
1	5													
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi	100							

1	05	01	2,01		Perencanaan,Penganggar an,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencana, penganggaran, dan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	3	3	3	3	100%	3	2	67%
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	9	9	9	100%	10	6	24%
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	3	3	3	100%	5	1	17%
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	1	1	1	100%	1	0	0%
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen pelaksanaan administrasi keuangan periodik perangkat daerah yang tersusun	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	84	84	84	100%	280	140	167%

1	05	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah yang tersusun	1	0	0	0	0	0	0	0%
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	130	130	130	100%	0	0	0%
1	05	01	2,06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	4	4	4	4	100%	4	0	0%
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	6	25%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	6	50%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	6	25%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	85	85	85	100%	500	153	180%

1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.	2	2	2	2	100,00%	2	0	0%
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	6	25%
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	12	12	12	100%	12	6	25%
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	3	3	3	3	100,00%	3	0	0%
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak tahunan (STNK) secara rutin/berkala selama 1 tahun anggaran	14	11	11	11	100%	11	6	43%
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	25	25	25	100%	13	3	6%

1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	100%	2	0	0%
1	05	03			PEROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100							
1	05	03	2,01	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6500	6500	6500	6500	100,00%	701678	0	0%
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	6500	6500	700331	6500	1%	6500	0	0%
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5400	5000	5000	5000	100,00%	5200	0	0%

1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	5	1	1	1	100%	0	0	0%
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200	260	260	260	100%	200	0	0%
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	30	7	10	7	70%	0	0	0%
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penanganan pasca bencana	5	43	37	43	116%	0	0	0%
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	200	200	200	200	100%	0	0	0%
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1149	8834	8834	3454	39,10%	1161	0	0%

1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah prioritas	1	0	0	0	0%	1	0	0%
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen kaji cepat	1	1	1	1	100%	1	0	0%
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	8834	673	8834	673	8%	3419	910	10%
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5026	629	5026	629	13%	920	47	1%

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN : 2023

INDIKATOR SASARAN RPMD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

1. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang tertangan tepat waktu sesuai SOP = 100%
 2. Presentase Kecamatan yang memiliki Peta Rawan Bencana = 100%
 3. Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat = 100%
 4. Presentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah Korban Pasca Bencana = 100%
 5. Predikat Evaluasi SKMP oleh APIP = A
- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana = 95%

NO	Kode	SASARAN	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.							
								I		II		III		IV													
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	14 = 6 + 12	15 = 14 / 5 x 100%	16	17												
1				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
			Urusan Wajib																								
1	05			Keteraturan Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	14.920.447.548	91	5.210.122.407	100	5.372.863.260	23%	1.222.256.535	27%	1.466.094.859	26%	1.381.415.619	21%	1.121.538.266	1	5.191.305.279	45,98	10.401.427.886	45,98	69,71	BPBD		
1.	1	05	01	Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Bencana	ROGRAM PUNLIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja indikator program teknis Perangkat Daerah (%)	100	9.598.781.179	100	3.260.336.512	100	3.186.168.310	26%	821.850.735	30%	970.220.659	19%	615.921.827	19%	603.991.216	1	3.011.984.437	50,47	6.272.320.949	50,47	65,34	BPBD
1.	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan evaluasi Kinerja (%)	100	397.063.000	100	71.882.050	100	107.671.000	1%	1.576.800	28%	30.255.000	31%	33.620.400	44%	47.770.000	1	113.222.200	50,53	185.104.250	50,53	46,62	BPBD
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	25	234.153.000	8	28.175.000	9	68.421.760	0	-	2	15.000.000	4	14.970.800	3	38.350.000	9,0	68.320.800	8,50	96.495.800	34,00	41,21	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan khtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	6	99.400.000	2	31.087.050	3	25.633.960	0	1.576.800	1	13.005.000	0	9.550.000	2	7.170.000	3,0	31.301.800	2,50	62.388.850	41,67	62,77	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja perangkat daerah (Laporan)	3	63.510.000	1	12.620.000	1	13.615.280	0	-	0	2.250.000	0	9.099.600	1	2.250.000	1,0	13.599.600	1,00	26.219.600	33,33	41,28	
2.	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Keuangan (%)	100	6.294.167.694	97	2.086.977.255	100	2.015.559.340	22%	445.463.045	35%	712.640.054	21%	432.921.444	14%	290.948.738	1	1.881.973.281	48,97	3.968.950.536	48,97	63,06	BPBD
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	21	6.294.167.694	84	2.086.977.255	21	2.015.559.340	21,00	445.463.045	21	712.640.054	21	432.921.444	21	290.948.738	84,0	1.881.973.281	84,00	3.968.950.536	400,00	63,06	
2.	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi Kepegawaian (%)	100	725.250.000	97	-	100	97.500.000	100%	97.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	1	97.500.000	49,00	97.500.000	49,00	13,44	BPBD
	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (paket)	300	300.000.000	0	-	130	97.500.000	130	97.500.000	0	-	0	-	-	130,0	97.500.000		97.500.000				
	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	10	425.250.000	0	-	0	-	0,00	-	0	-	0	-	-	0,0	-		-				

3.	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum (%)	100	1.571.902.635	76	681.864.331	100	426.337.320	36%	155.346.885	18%	77.038.694	12%	52.802.000	33%	140.866.571	1	426.054.150	38,50	1.107.918.481	38,50	70,48	BPBD		
	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	108	209.842.085	36	82.798.300	12	74.877.680	3	25.415.200	3	22.922.000	3	18.067.000	3	8.360.200	12,0	74.764.400	24,00	157.562.700	22,22	75,09			
	1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	36	107.314.000	12	103.895.000	12	51.061.140	3	11.055.000	3	8.645.700	0	-	6	11.766.600	12,0	31.467.300	12,00	135.362.300	33,33	126,14			
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	72	351.004.550	24	29.657.500	12	9.536.500	3	1.894.350	3	3.096.100	3	4.545.000	3	-	12,0	9.535.450	18,00	39.192.950	25,00	11,17			
	0	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	240	903.742.000	80	465.513.531	85	290.862.000	20	116.982.335	23	42.374.894	18	30.190.000	24	120.739.771	85,0	310.287.000	82,50	775.800.531	34,38	85,84			
4.	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	344.520.000	100	-	100	-	0,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0,00	-	50,00	-	50,00	0,00	BPBD		
	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	5	54.500.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	290.020.000	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
5.	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100	512.948.000	100	240.264.426	100	250.060.500	28%	70.282.505	30%	74.442.411	18%	45.531.183	22%	54.923.707	1	245.179.806	50,49	485.444.232	50,49	94,64	BPBD		
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	199.675.000	12	71.988.826	12	76.812.000	3	20.161.505	3	17.787.261	3	15.861.693	3	21.711.081	12,0	75.521.540	12,00	147.510.366	33,33	73,88			
	1	05	01	2.08	06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	313.273.000	12	168.275.600	12	173.248.500	3	50.121.000	3	56.655.150	3	29.669.490	3	33.212.626	12,0	169.658.266	12,00	337.933.866	33,33	107,87			
6.	0	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	478.179.850	100	179.348.450	100	289.040.150	18%	51.681.500	26%	75.844.500	18%	51.046.800	24%	69.482.200	1	248.055.000	50,43	427.403.450	50,43	89,38	BPBD		
	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	37	388.458.000	12	140.717.620	11	211.810.000	3	43.205.000	3	54.866.200	3	17.570.600	3	59.287.700	12,0	174.929.500	12,00	315.647.120	32,43	81,26			
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	45.584.750	12	30.913.130	25	8.980.000	3	3.050.000	1	500.000	9	1.190.000	12	4.240.000	25,0	8.980.000	18,50	39.893.130	37,00	39,18			
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	44.137.100	2	7.717.700	2	68.250.150	0	5.426.500	1	20.478.300	1	32.286.200	0	5.954.500	2,0	64.145.500	2,00	71.863.200	33,33	162,82			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							48,15	60,70						
Predikat Kinerja																							SANGAT RENDAH		RENDAH					

Z.	1	05	03		Meningkatnya Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Perentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100%	5.321.666.369	100	1.949.786.095	100%	2.186.694.950	18%	400.405.800	23%	495.874.200	35%	765.493.792	24%	517.547.050	1	2.179.320.842	50,50	4.129.106.937	5049,83	77,59	BPBD
1.	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	701567	92.675.000	698791	18.134.000	701678	30.620.000	58%	17.840.000	41%	12.630.000	0%	150.000	0%	-	1	30.620.000	#####	48.754.000	49,80	52,61	
	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapat pam sosialisas, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya (Orang)	2100993	92.675.000	698791	18.134.000	700331	30.620.000	0	17.840.000	0	12.630.000	0	150.000	0	-	0,0	30.620.000		48.754.000	0,00	52,61	
2.	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4300	1.442.866.969	5000	590.208.795	4300	846.562.200	2%	18.152.900	12%	103.032.950	64%	543.443.792	21%	178.616.050	1	843.245.692	2500,50	1.433.454.487	58,15	99,35	BPBD
	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi (dokumen)	2	107.913.000	1	136.808.295	1	4.940.000	0	-	0,00	-	0,00	-	1	4.940.000	1,0	4.940.000	1,00	141.748.295	50,00	131,35	
	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	200	35.000.000	0	-	260	577.908.200	0	-	0,00	36.981.000	150,00	378.937.742	110	160.196.050	260,0	576.114.792	130,00	576.114.792	65,00	1646,04	
	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (kawasan)	30	219.580.240	0	-	10	14.734.000	5	9.292.900	2	5.200.000	0	-	0,00	-	7,0	14.492.900	3,50	14.492.900	11,67	6,60	
	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penanganan pasca bencana (Laporan)	5		2		37		39	5		0		43		87,0		44,50		890,00			
							Jumlah Paket Rehabilitasi (Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Terdampak Bencana (paket)	9	1.080.373.729	2	453.400.500	1	245.980.000	0	0		1	161.506.050	0,00		1,0		1,50	698.098.500	16,67	65		
	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan (orang)	400		150	52.407.500	200	3.000.000	0	-	0	-	200	3.000.000	0,00	-	200,0	3.000.000	175,00		43,75		

3.	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8834	3.786.124.400	3454	1.341.443.300	8834	1.309.512.750	28%	364.412.900	29%	380.211.250	17%	221.900.000	26%	338.931.000	1	1.305.455.150	1727	2.646.898.450	20	69,91	BPBD				
	1	05	03	2.02	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat (Dokumen)	1	10.000.000	0	-	1	15.037.500	0	7.080.000	0	4.830.000	0	900.000	1	2.170.000	1,0	14.980.000	0,50	14.980.000	50,00	149,80					
	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian (orang)	26502	3.693.011.000	3454	1.286.029.400	8834	1.257.944.000	319	357.332.900	104	338.850.000	112	221.000.000	138	336.761.000	673,0	1.253.943.900	2063,50	2.539.973.300	7,79	68,78					
	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana (orang)	15078	93.113.400	3629	55.413.900	5026	36.531.250	270	-	85	36.531.250	158	-	116	-	629,0	36.531.250	2129,00	91.945.150	14,12	98,75					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									42,50	73,96						
Predikat Kinerja																									SANGAT RENDAH	SEDANG						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								5.372.863.260		1.222.256.535		1.466.094.859		1.381.415.619		1.121.538.266		5.191.305.279														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)																													90,65	67,33		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 2)																													SANGAT TINGGI	SEDANG		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA:																																
1. Laporan pengesahan dan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu																																
2. Ketersediaan dana operasional program/kegiatan yang cukup memadai																																
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA:																																
1. Kompetensi dan Kapasitas SDM yang belum sepenuhnya memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya, terutama dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing.																																
2. Keterbatasan jumlah anggaran serta sarana prasarana yang belum memadai dibandingkan beban kerja serta luasnya wilayah kerja BPBD Kab. Bone																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA:																																
1. Peningkatan Kerja sama tim oleh seluruh SDM yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi masing-masing																																
2. Mendorong langkah-langkah percepatan capaian kinerja dari program/kegiatan yang masih rendah tingkat capaian kinerjanya.																																
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA:																																
1. Penguatan BPBD Kab. Bone melalui peningkatan anggaran serta sarana prasarana agar lebih memadai sesuai dgn beban kerja																																
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai yg kompeten dan dilat/bimtek sesuai kebutuhan BPBD Kab. Bone																																

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

(Tabel II Analisis Pencapaian Layanan Kinerja akan disajikan dalam Tabel TC– 30)

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	(18)		(20)
1	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	CC	B	B	BB	BB	A	C	B	B	BB	A	A	B	B	BB	BB	A	
2	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	85	90	95	-	-	-	103%	110%	104%	85	90	95	90	95	
3	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	85%	75%	89%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	-	-	26%	41%	56%	70%	85%	100%	11%	243%	178%	142%	118%	100%	41%	56%	70%	85%	100%	
5	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	-	-	78%	82%	86%	90%	95%	100%	74%	52%	104%	78%	86%	84%	82%	86%	90%	95%	100%	
6	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meninjau keadaan geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Bone memiliki daerah rawan terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, faktor manusia, faktor sosial, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya dalam hal penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Bone yang telah menjadi agenda maupun skala prioritas para pemangku kepentingan (Stake holder), sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, jika seandainya penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistematis, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan bencana dan meminimalisasikan kemungkinan kerusakan yang lebih parah terhadap aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki baik pemerintah sendiri maupun masyarakat secara umum. Hal ini karena penanganan bencana yang sistematis dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek

tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone antara lain :

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- Luasnya Cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di tingkat kecamatan/kelurahan dan desa sehingga menghambat ketetapan penyebaran arus data kekabupaten/kota;
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam yang ada didunia.

Namun demikian kondisi ekonomi di wilayah Kabupaten Bone 2013 sampai sekarang yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan nasional yang ditetapkan dan menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan per indikator adalah :

- Penetapan kinerja rendah disebabkan penetapan program dan kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis
- Anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara kepedulian dari masing - masing membuat/memyediakan sub domain masih rendah

(Tabel III Review Terhadap Rancangan Awal BPBD akan disajikan dalam Tabel TC– 31)

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tanete Riattang Barat	Persentase Program Teknis Perangkat Derah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	2.435.390.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tanete Riattang Barat	Persentase Program Teknis Perangkat Derah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)	100%	2.435.390.735	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	20 Dokumen	51.597.580	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang tersusun	20 Dokumen	51.597.580	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	33.171.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	33.171.700	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.328.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.328.600	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	13.097.280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	13.097.280	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan periodik pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.922.754.902	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan periodik pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1.922.754.902	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.922.754.902	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanete Riattang Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	1.922.754.902	

	Administrasi Umum	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	179.913.140	Administrasi Umum	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	179.913.140	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.853.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.853.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.061.140	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.061.140	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.810.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.810.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	115.188.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	115.188.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.	2 Dokumen	169.050.363	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Jenis Jasa Penunjang penyelenggaraan urusan yang tersedia sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.	2 Dokumen	169.050.363	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.395.563	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.395.563	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.654.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	91.654.800	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	112.074.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai Rencana Kebutuhan Pemeliharaan pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	112.074.750	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	104.699.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	104.699.600	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.510.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.510.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.865.150	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.865.150	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	95%	2.137.364.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kab. Bone	Persentase Pelaksanaan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	95%	2.137.364.000	
		Persentase Penanganan Kejadian Darurat Bencana	70%				Persentase Penanganan Kejadian Darurat Bencana	70%		
		Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi	2 Lokasi				Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi	2 Lokasi		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6500 Orang	10.700.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6500 Orang	10.700.000	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bone	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	6500 Orang	10.700.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bone	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	6500 Orang	10.700.000	

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5200 Orang	1.754.400.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5200 Orang	1.754.400.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 Orang	1.754.400.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 Orang	1.754.400.000	
Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1161 Orang	292.264.000	Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1161 Orang	292.264.000	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah prioritas	1 Laporan	245.600.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah prioritas	1 Laporan	245.600.000	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen kaji cepat	1 Dokumen	12.060.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen kaji cepat	1 Dokumen	12.060.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	3419 Orang	20.223.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	3419 Orang	20.223.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	920	14.381.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	920	14.381.000	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bone	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 Dokumen	80.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bone	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 Dokumen	80.000.000	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	80.000.000	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	80.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, leaflet, spanduk, buku dan lain-lain, Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana melalui kegiatan pembentukan relawan penanggulangan bencana, dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan relawan penanggulangan bencana, Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur dalam bidang kebencanaan, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Pemberdayaan posko siaga bencana, dan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui kegiatan peninjauan dan penanganan korban dilokasi bencana dan kegiatan penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana, serta kegiatan Penyiapan hunian sementara bagi korban bencana dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan .

Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone; Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran mewujudkan sistem penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Tangguh, Cepat dan Tepat serta handal dalam hal penanganan prabencana, tanggap darurat (saat bencana), pasca bencana serta terwujudnya sistem kedaruratan bencana efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan,

peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien serta terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Sasaran Peningkatan Aparatur, Program Pengembangan Data/Informasi serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun besarnya flapon anggaran program prioritas pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan atas dasar tersebut anggaran tersebut masih dianggap masih kurang dilihat dari intensitas kegiatan dan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan pada setiap tahunnya.

(Tabel IV Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam Tabel TC.32)

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	USULAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak yang Terdampak Bencana (Paket)	Desa Pallawa, Kec. Tellulimpoe Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana (Paket)	Dusun Pacciro, Kec. Ajangale, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun 1 Manciri, Kec. Ajangale, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	Timurung, Kec. Ajangale, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	

5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Link. Dusun Salotimpoe, Desa Massenreng Pulu, Kec. Sibulue, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Desa Cinennung, Kec. Cina, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Seppange, Desa Tungke, Kec. Bengo, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Bonto Riu, Desa Tondong, Kec. Tellulimpoe, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Watang Ulo I, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun 1 Laoni dan Dusun 2 Lawo-Lawo Desa Laoni, Kec. Cenrana, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	

12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Mabbatue, Desa Tenri Pakkua, Kec. Lappariaja, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun II Bilae, Desa Patimpeng, Kec. Patimpeng, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Desa Pammusureng, Kec. Bontocani, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Situs Manurunge, Kelurahan Manurungge, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Tellang Kere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
4. Menetapkan Standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana yang masuk dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana dipusat dan didaerah, optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana,

mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk periode satu tahun anggaran yang mempunyai fungsi :

- a) Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
- b) Menciptakan kepastian kebijakan , yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bone;
- c) Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan di Bidang Kebencanaan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang bersinergi dengan Rencana Strategis 3 (tiga) tahunan, antara lain:

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Dalam Penanganan Bencana Daerah

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah untuk mewujudkan masyarakat sejaterah

- a. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bone Pada Rencana Kerja Tahun 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu di wilayah daerah kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas
2. Optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana;
3. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Mendorong dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sehat yang mandiri yang merupakan salah faktor pendorong peningkatan indeks pembangunan manusia;
5. Mendorong dan berpartisipasi dalam pengembangan data dan informasi dalam hal penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
6. Peningkatan Sumber Daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;
7. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana;
8. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bone;
9. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Sedangkan Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana
- Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Sub kegiatan:

- Penyusunan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub kegiatan:

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
- Penyediaan logistic penyelamatan dan Evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Gambaran Umum Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kabupaten/Kota mencakup Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan RKPD kabupaten/kota. Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Secara substansial Rencana Kerja memuat arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan penanggung jawab yang wajib dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

4.2 Rumusan Rencana Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Berdasarkan arah kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone serta pertimbangan pagu anggaran yang ada maka prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 tertuang dalam table TC. 33 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BONE
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.185.624.888,00	4.945.086.072,00	4.572.764.735,00	-612.870.153,00							6.075.000.000,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.185.624.888,00	4.945.086.072,00	4.572.764.735,00	-612.870.153,00							6.075.000.000,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (minimal 76%)				100 %	100 %	2.968.879.888,00	2.807.722.072,00	2.435.390.735,00	261.120.112,00							3.230.000.000,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	122.371.000,00	80.632.280,00	51.597.580,00	-70.773.420,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja BPBD	140.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	48.571.760,00	41.671.700,00	33.171.700,00	-15.400.060,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		50.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.633.960,00	25.795.300,00	5.328.600,00	-45.305.360,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		60.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	23.165.280,00	13.165.280,00	13.097.280,00	-10.068.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		30.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.175.624.888,00	2.195.086.302,00	1.922.754.902,00	-252.869.986,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Keuangan BPBD	2.200.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	2.175.624.888,00	2.195.086.302,00	1.922.754.902,00	-252.869.986,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		2.200.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	343.717.939,00	247.244.960,00	179.913.140,00	-163.804.799,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Pelayanan Administrasi Umum BPBD	430.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	74.793.520,00	74.792.700,00	37.853.100,00	-36.940.420,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		80.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.061.140,00	21.061.140,00	21.061.140,00	0,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik		30.000.000,00		BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.535.450,00	9.536.150,00	5.810.900,00	-3.724.550,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	238.327.829,00	141.855.000,00	115.188.000,00	-123.139.829,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	155.465.400,00	153.549.300,00	169.050.363,00	13.584.963,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Jasa Penunjang Usuhan Pemerintahan BPBD		220.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.675.000,00	60.394.500,00	77.395.563,00	16.720.563,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.790.400,00	93.154.800,00	91.654.800,00	-3.135.600,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			150.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	171.700.661,00	131.209.200,00	112.074.750,00	-59.625.911,00			Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Barang Milik Daerah pada BPBD		240.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	8 Unit	146.700.661,00	116.699.600,00	104.699.600,00	-42.001.061,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	15.000.000,00	4.510.000,00	4.510.000,00	-10.490.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	9.999.600,00	2.865.150,00	-7.134.850,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik 1. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Wilayah Pasca Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi Persentase Penanganan Kejadian Darurat Bencana Persentase Pelaksanaan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 70 96 Lokasi %	2 70 96 Lokasi %	2.216.745.000,00	2.137.364.000,00	2.137.364.000,00	628.255.000,00							2.845.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana				100 %	100 %	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-4.300.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Infrastruktur daerah ketahanan Bencana Dan Perubahan iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Masyarakat Kab. Bone		25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGKAM BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				6500 Orang	6500 Orang	15.000.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-4.300.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100 %	100 %	1.754.400.000,00	1.754.400.000,00	1.754.400.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Masyarakat Kab. Bone, Aparat BPBD		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				200 Kawasan	200 Kawasan	1.754.400.000,00	1.754.400.000,00	1.754.400.000,00	0,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 %	100 %	317.345.000,00	292.264.000,00	292.264.000,00	-25.081.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Masyarakat yang terkena bencana		620.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	245.600.000,00	245.600.000,00	245.600.000,00	0,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPCB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	12.060.000,00	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				3419 Orang	3419 Orang	20.300.000,00	20.223.000,00	20.223.000,00	-77.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				920 Orang	920 Orang	39.385.000,00	14.381.000,00	14.381.000,00	-25.004.000,00	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	Dokumen mengenai Penanggulangan Bencana		200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASHA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan 3. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
			J U M L A H						5.185.624.888,00	4.945.086.072,00	4.572.754.735,00	-612.870.153,00							6.075.000.000,00	

BAB V.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2026.

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif bersumber dari APBD. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bone ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.